

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP  
KUALITAS PELAYANAN PAUD DI DINAS PENDIDIKAN  
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN  
KABUPATEN SUMEDANG**

Ade Zohansah<sup>1</sup>, Yofy Syarkani<sup>2</sup>, Diani Indah<sup>3</sup>  
zethaen15@gmail.com<sup>1</sup>, yofysyarkani@gmail.com<sup>2</sup>, indahdiani7160@gmail.com<sup>3</sup>  
Universitas Langlangbuana

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami dampak implementasi kebijakan terhadap kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Metode analisis deskriptif digunakan dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data meliputi kuesioner dan studi pustaka. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna layanan PAUD di Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, yang terdiri dari 41 lembaga PAUD. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 41 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Data dianalisis menggunakan teknik regresi linear sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara implementasi kebijakan terhadap kualitas layanan PAUD di Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, yang ditunjukkan oleh nilai  $t$ -hitung  $>$   $t$ -tabel ( $7.199 > 2.023$ ) atau nilai Sig  $<$  tingkat signifikansi  $\alpha$  ( $0.000 < 0.05$ ). Besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap kualitas layanan adalah sebesar 57,1%, sedangkan sisanya 42,9% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap kedua variabel, dapat disimpulkan bahwa baik implementasi kebijakan maupun kualitas layanan PAUD termasuk dalam kategori 'Baik'. Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi kualitas layanan PAUD di Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Kualitas Pelayanan PAUD.

**ABSTRACT**

*This study aims to analyse and understand the impact of policy implementation on the quality of early childhood education services at the Education Office of South Sumedang District, Sumedang Regency. A descriptive analysis method was used along with a quantitative approach. Data collection techniques included questionnaires and literature reviews. The population in this study consisted of all users of early childhood education services at the Education Office of Sumedang Selatan Sub-District, Sumedang Regency, totaling 41 early childhood education centres. The sample size was 41 respondents. The sampling technique applied in this study was saturated sampling. Data were analysed using simple linear regression techniques.*

*The research findings indicate that there is a positive and significant influence of policy implementation on the quality of PAUD services at the Education Office of Sumedang Selatan Sub-District, Sumedang Regency, as shown by  $t$ -calculated  $>$   $t$ -table ( $7.199 > 2.023$ ) or Sig value  $<$  significance level  $\alpha$  ( $0.000 < 0.05$ ). The magnitude of the influence of policy implementation on service quality is 57.1%, while 42.9% is influenced by other variables or factors not included in the study.*

*Based on the results of the descriptive statistical analysis of both variables, it can be concluded that both policy implementation and PAUD service quality fall into the 'Good' category. Thus, policy implementation is an important factor that can influence the quality of PAUD services at the Education Office of Sumedang Selatan Sub-District, Sumedang Regency.*

**Keywords :** Policy Implementation, Quality of Early Childhood Education Services.

## 1. PENDAHULUAN

UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan sebuah usaha pembinaan yang diperuntukkan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun melalui stimulasi pendidikan guna mendukung pertumbuhan serta perkembangan fisik dan mental, sehingga anak siap melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Perpres Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 mengatur pengembangan anak usia dini secara holistic integratif. Pendekatan ini bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar anak secara menyeluruh, terstruktur, dan saling berkaitan dalam satu sistem yang terpadu.

Kualitas pendidikan di suatu lembaga PAUD tidak hanya berdampak pada keberlangsungan penyelenggaraannya di masa depan, tetapi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Elliot (dalam Winarno, 2018) mengungkapkan bukti yang menunjukkan bahwa PAUD yang berkualitas memiliki dampak positif terhadap perkembangan sosial, kognitif serta kemampuan anak dalam beradaptasi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, pelayanan yang berkualitas sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat. Permendikbud No. 18 Tahun 2018 mengatur tentang penyediaan layanan PAUD secara universal untuk semua anak usia dini. Tujuan dari upaya ini untuk memastikan anak usia dini mendapatkan akses yang optimal dalam perkembangan dan pengasuhan, serta memperoleh pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas untuk bekal sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.

Kualitas pelayanan PAUD menjadi hal yang sangat penting, baik kualitas pelayanan lembaga PAUD terhadap peserta didiknya maupun kualitas pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terhadap Lembaga PAUD. Namun harapan dan tuntutan sebagaimana dikemukakan, masih memiliki kendala bagi Lembaga PAUD di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi kebutuhan masyarakat terhadap layanan PAUD yang belum terpenuhi, keterbatasan jumlah serta kualitas tenaga pendidik atau pamong, rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya PAUD, serta kebijakan pemerintah yang masih kurang mendukung. Selain itu, mutu layanan PAUD juga masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal ketersediaan sarana dan

prasarana, ketidakseimbangan rasio guru dan siswa, keterbatasan dana, dan minimnya keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD (Umiyati & Hartono, 2021).

Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang adalah institusi pemerintahan yang selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama dalam layanan pendidikan. Dari hasil pengamatan awal ditemukan masih adanya permasalahan terkait pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, khususnya pelayanan terhadap lembaga PAUD. Pelayanan tersebut, berupa jenis pelayanan pembinaan tutor, pelayanan pembinaan lembaga PAUD, dan pelayanan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pelayanan tersebut masih kurang sesuai dengan PerBup Sumedang No. 126 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini.

Pelayanan yang diberikan Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang khususnya Pembinaan Tutor PAUD pada tahun 2024 tidak tercapai dari yang ditargetkan. Begitu juga Pembinaan Lembaga PAUD, ada tiga jenis pelayanan yang tidak tercapai dari yang ditargetkan. Kemudian, mengenai Bantuan Operasional Sekolah (BOS), masih ada satu sekolah yang belum menerima bantuan. Dengan demikian, kualitas pelayanan PAUD dari Bidang PAUD dan Dikmas Kabupaten Sumedang belum relevan. Dari permasalahan kualitas pelayanan Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang tersebut, diindikasikan dari kurang konsistennya dalam melakukan implementasi kebijakan PAUD yang ada.

## TINJAUAN TEORI

### Implementasi Kebijakan

Implementasi dikatakan sebagai suatu proses pelaksanaan atau penerapan (Pramono, 2020:1). Kemudian, menambahkan bahwa implementasi umumnya berkaitan dengan pelaksanaan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga atau badan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah dirancang. Jika dikaitkan dengan kebijakan, implementasi bukan sekadar perumusan dan penetapan dalam bentuk hukum formal seperti undang-undang yang kemudian dibiarkan tanpa tindakan. Sebaliknya, kebijakan harus dijalankan agar dapat memberikan dampak

dan mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan serangkaian langkah strategis yang dilakukan dengan sarana tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai hasil yang diharapkan. (Pramono, 2020:1).

Van Meter dan Van Horn (dalam Pramono, 2020: 3) mengartikan penerapan kebijakan publik sebagai tindakan dalam keputusan sebelumnya. Implementasi kebijakan mencakup berbagai tindakan yang bertujuan mengubah keputusan menjadi langkah-langkah konkret dalam periode waktu yang telah ditentukan. Proses ini juga mencakup usaha berkelanjutan untuk mendorong perubahan, baik dalam skala besar maupun kecil, sesuai dengan ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan. Organisasi publik bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan ini demi mencapai sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya.

Menurut Edward III (dalam Nugroho, 2018: 363), penerapan kebijakan terbagi menjadi 4 dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### a) Komunikasi (Communication)

Keberhasilan komunikasi dalam penerapan kebijakan dapat diukur melalui tiga indikator utama:

- 1) Transmisi – Proses penyampaian informasi kebijakan secara efektif kepada pihak terkait.
- 2) Clarity – Kejelasan kebijakan agar mudah dipahami oleh pelaksana dan masyarakat.
- 3) Consistency – Konsistensi dalam penerapan kebijakan untuk menghindari penyimpangan.

#### b) Sumber Daya (Resources)

Ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Indikatornya meliputi:

- 1) Sumber Daya Manusia (Staff) – Kompetensi dan jumlah tenaga kerja yang memadai.
- 2) Anggaran (Budgetary) – Kecukupan dana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.
- 3) Fasilitas (Facility) – Sarana dan prasarana yang memadai.
- 4) Informasi dan Kewenangan (Information and Authority) – Akses terhadap

informasi serta wewenang dalam pengambilan keputusan.

#### c) Disposisi (Disposition)

Keberhasilan kebijakan tidak bergantung hanya pada pemahaman, tetapi pada kemampuan dan sikap pelaksana dalam menjalankannya. Indikator penting dalam dimensi ini meliputi:

- 1) Komitmen – Kesungguhan dalam menjalankan kebijakan.
- 2) Konsistensi – Keberlanjutan dalam implementasi kebijakan.
- 3) Kejujuran – Integritas dalam menjalankan tugas.
- 4) Kedisiplinan – Kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang ditetapkan.

#### d) Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur birokrasi yang jelas diperlukan agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Aspek penting dalam dimensi ini meliputi:

- 1) Mekanisme atau Standar Prosedur Pelaksanaan (Standard Operating Procedure/SOP) – Panduan yang mengatur proses pelaksanaan kebijakan.
- 2) Struktur Organisasi atau Pembagian Kerja – Tugas dan tanggung jawab yang terstruktur dengan baik untuk mendukung implementasi kebijakan.

### Kualitas Pelayanan

Sebelum mengartikan tentang kualitas pelayanan publik, perlu kiranya diungkapkan terlebih dahulu tentang pengertian kualitas dan pelayanan publik. Kemudian setelah diungkapkan kedua pengertian tersebut, barulah akan dikemukakan pengertian tentang kualitas pelayanan publik.

Seperti yang dikemukakan Kotler (dalam Napitupulu, 2020:165) “Kualitas merupakan kumpulan karakteristik dan sifat suatu produk atau layanan yang menentukan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan atau yang masih tersembunyi”. Tjiptono (dalam Sedarmayanti (2021:267) berpendapat bahwa kualitas berarti:

- 1) Kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan
- 2) Kecocokan pemakaian

- 3) Perbaikanberkelanjutan
- 4) Bebasdarikerusakan
- 5) Pemenuhan kebutuhanpelanggan semenjak awaldan setiap saat
- 6) Melakukansegala sesuatu secarabenar semenjak awal
- 7) Sesuatuyang bisamembahagiakan pelanggan

Berdasarkan pengertian di atas, disimpulkan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi yang bersifat dinamis, yang menggambarkan tingkat kesempurnaan suatu produk atau jasa dalam memenuhi harapan penerima layanan. Setiap kegiatan yang dilakukan memiliki tujuan yang ingin dicapai, tidak hanya dalam aspek efektivitas dan efisiensi, tetapi juga dalam menghasilkan layanan dengan kualitas yang baik.

Pelayanan publik, pada dasarnya, merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Dalam hal ini, pemerintah sebagai birokrasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan bagi setiap warga negara dan penduduk, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Layanan ini mencakup penyediaan barang, jasa, serta pelayanan administratif yang diberikan oleh pihak penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Santosa (2019: 58), Pelayanan publik merujuk pada penyediaan jasa yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta kepada masyarakat, baik secara gratis maupun berbayar, guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik merupakan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai penyedia layanan, pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, karena tujuan utama dari pelayanan publik adalah tercapainya kepuasan masyarakat.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, terdapat beberapa ahli mengungkapkan pengertiannya tentang kualitas pelayanan publik, diantaranya sebagai berikut.

1. Menurut Zeithaml, Berry, dan Parasuraman (dalam Hardiansyah, 2019:42), kualitas pelayanan publik merupakan suatu aspek

dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan. Penilaian terhadap kualitas ini dilakukan saat pelayanan publik diberikan.

2. Riadi (2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik mencerminkan proses pelayanan yang dilakukan oleh penyedia layanan, dalam hal ini pemerintah, dalam mendistribusikan atau memasarkan produk. Pelayanan ini berorientasi pada kepuasan serta harapan masyarakat sebagai penerima layanan, yang harus sesuai dengan standar pelayanan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan keseluruhan upaya pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara secara optimal, sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelayanan ini bertujuan untuk menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan standar yang berlaku, guna memenuhi kepuasan, kebutuhan, dan harapan masyarakat sebagai penerima layanan.

Menurut Zeithaml, Berry, dan Parasuraman (dalam Hardiansyah, 2019:46), terdapat lima dimensi utama yang menentukan kualitas pelayanan, yaitu:

1. Berwujud (Tangible) – Kualitas pelayanan dapat dilihat dari aspek fisik seperti fasilitas perkantoran, sistem administrasi berbasis komputer, ruang tunggu, serta pusat informasi. Indikatornya mencakup: penampilan petugas dalam melayani, kenyamanan tempat pelayanan, serta ketersediaan alat bantu yang memadai.
2. Keandalan(Reliability)–Kemampuan dalam memberikan pelayanan yang akurat dan terpercaya. Indikatornya meliputi: kecermatan petugas dalam melayani, keberadaan standar pelayanan yang jelas, keahlian dalam memberikan informasi yang akurat, serta keterampilan petugas dalam menggunakan peralatan pendukung pelayanan.
3. Ketanggapan(Responsiveness)–Kesanggupan dalam membantu serta memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Indikatornya mencakup: respons petugas terhadap permintaan pelanggan, kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, serta kecermatan dalam menangani permohonan.

4. Jaminan (Assurance) – Faktor yang mencerminkan kepercayaan dan rasa aman bagi pelanggan, yang meliputi: keramahan serta profesionalisme petugas. Indikatornya mencakup ketepatan waktu pelayanan, kepastian biaya, serta jaminan legalitas dalam proses pelayanan.
5. Empati (Empathy) – Sikap peduli dan perhatian dari petugas terhadap pelanggan. Indikatornya mencakup: prioritas terhadap kepentingan pelanggan, keramahan dalam melayani, komunikasi yang baik, perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, serta penghargaan terhadap setiap pelanggan.

### Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur sistem pendidikan di Indonesia. UU ini menjadi landasan hukum bagi pengelolaan pendidikan di Indonesia. Tujuan UU Sisdiknas, yaitu: Menjamin pemerataan akses Pendidikan; Meningkatkan mutu Pendidikan; Meningkatkan efisiensi dan relevansi manajemen pendidikan; Membentuk generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan unggul dalam berbagai aspek. Aspek yang diatur UU Sisdiknas, yaitu: Definisi pendidikan dan sistem pendidikan nasional; Pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan nasional; Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan nasional; Kebijakan wajib belajar; Standar Nasional Pendidikan.

Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Peraturan Menteri tersebut adalah panduan pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia. Tujuan peraturan tersebut adalah: Memberikan pedoman pendirian dan pengelolaan PAUD yang terstandar dan berkualitas; Memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak-anak usia dini; Membangun fondasi pendidikan yang kuat bagi generasi penerus bangsa.

Legalitas pendirian lembaga PAUD merupakan aspek krusial dalam proses administrasi dan implementasi kebijakan PAUD oleh pemerintah. Keberadaan legalitas ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum operasional lembaga PAUD, tetapi juga sebagai bagian dari upaya promosi dan pengembangan layanan pendidikan anak usia dini secara lebih luas.

Dalam konteks ini, manajemen fasilitas PAUD berperan penting dalam memastikan

bahwa setiap langkah dalam prosedur pendirian lembaga PAUD dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup pemenuhan persyaratan administratif, teknis, serta kepatuhan terhadap standar penyelenggaraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya legalitas yang jelas, lembaga PAUD dapat beroperasi dengan jaminan hukum yang kuat, memperoleh dukungan dari pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Oleh karena itu, pengelolaan fasilitas PAUD harus dilakukan dengan baik agar seluruh prosedur dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena melalui data numerik yang kemudian dianalisis, biasanya dengan menggunakan teknik statistik (Muijs, D. dalam Ghozali, 2020:52). Metode kuantitatif mendokumentasikan variasi sosial dalam bentuk kategori angka dan mengandalkan analisis statistik untuk merangkum sejumlah besar data. Karena ukuran populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 sekolah, maka teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh dengan jumlah sampel 41 satuan pendidikan PAUD. Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Teknik analisis ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Selain menggunakan teknik analisis regresi linier, penelitian ini juga menerapkan analisis koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol hingga satu, di mana nilai yang kecil menunjukkan bahwa variabel independen hanya memiliki pengaruh terbatas terhadap variabel dependen. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen hampir sepenuhnya mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Pengujian regresi secara parsial bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap konstan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan

Deskripsi hasil penelitian tentang implementasi kebijakan peningkatan kualitas

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berfokus pada bagaimana kebijakan yang diterapkan di tingkat pemerintah atau lembaga pendidikan dapat berdampak pada kualitas pembelajaran dan perkembangan anak di tingkat PAUD. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan kualitas PAUD, jika diterapkan secara efektif, dapat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, perlu adanya perhatian terhadap tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Pelaksanaan Implementasi kebijakan terhadap peningkatan kualitas pelayanan PAUD Di Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang merupakan langkah penting dalam membangun dasar pendidikan yang kuat bagi anak-anak pada tahap awal kehidupannya. PAUD memegang peranan vital dalam mendukung perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial anak-anak, serta membantu mereka untuk lebih siap dalam menghadapi pendidikan dasar.

Pelaksanaan Implementasi kebijakan terhadap peningkatan kualitas pelayanan PAUD Di Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang merupakan langkah penting dalam membangun dasar pendidikan yang kuat bagi anak-anak pada tahap awal kehidupannya. PAUD memegang peranan vital dalam mendukung perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial anak-anak, serta membantu mereka untuk lebih siap dalam menghadapi pendidikan dasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 Pasal (1) tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik dengan kelainan serta potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan potensi unggul, untuk belajar dalam lingkungan yang sama. dan/bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Menjamin bahwa kurikulum PAUD

mengakomodasi semua jenis anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Standar dan Sasaran Kebijakan Ukuran serta Tujuan Kebijakan Peningkatan Kualitas PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran penting dalam pembentukan dasar-dasar perkembangan anak. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan kualitas PAUD harus mencakup standar yang jelas dan sasaran yang terukur untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas pada tahap awal kehidupannya.

Melalui kebijakan yang menyeluruh dan terintegrasi ini, diharapkan dapat tercipta layanan PAUD yang berkualitas, merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada perkembangan generasi yang cerdas, kreatif, dan memiliki keterampilan sosial yang baik.

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik dengan menggunakan program aplikasi IBM SPSS Statistics 27.0 menunjukkan bahwa rentangan skor variabel Implementasi Kebijakan (X) berada pada nilai minimum 49 sampai dengan maksimum 70 dengan skor rata-rata (mean) sebesar 58,51, sehingga skor rata-rata perbutir pernyataan dari 14 butir pernyataan adalah sebesar 4,18. Berdasarkan tabel Interval Range nilai rata-rata skor 4,18 tersebut masuk kedalam interval 3,50 – 4,29 dengan kategori "Baik".

### **Kualitas Pelayanan PAUD**

Kualitas pelayanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sangat penting dalam memastikan perkembangan anak di usia dini berjalan dengan optimal. Secara keseluruhan, kualitas pelayanan PAUD yang baik adalah yang mampu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.

Hasil pengolahan data statistik dengan menggunakan program aplikasi IBM SPSS Statistics 27.0 menunjukkan bahwa rentangan skor variabel Kualitas Pelayanan (Y) berada pada nilai minimum 61 sampai dengan maksimum 90 dengan skor rata-rata (mean) sebesar 75,78, sehingga skor rata-rata perbutir pernyataan dari 18 butir pernyataan adalah sebesar 4,21. Berdasarkan tabel Interval Range nilai rata-rata skor 4,21 tersebut masuk kedalam interval 3,50 – 4,29 dengan kategori "Baik"

## Sumber Daya Kebijakan

Sumber daya dalam penerapan kebijakan sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien. Sumber daya mencakup berbagai elemen, baik itu sumber daya manusia, keuangan, teknologi, maupun material yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Sumber daya yang dianalisis peneliti dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas PAUD di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Kecamatan Sumedang Selatan adalah sumber daya manusia, financial serta fasilitas yang dimiliki.

## Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Peningkatan kualitas pelayan PAUD di Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang Selatan

Implementasi kebijakan peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dinas Pendidikan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung dan menghambat. Faktor-faktor tersebut penting untuk dianalisis agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang maksimal. Berikut adalah beberapa faktor pendukung dan penghambat yang sering terjadi.

### Faktor Pendukung:

1. Dukungan Pemerintah: Kebijakan yang didukung oleh pemerintah pusat dan daerah sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi. Alokasi anggaran, program pelatihan, dan regulasi yang mendukung sangat penting untuk meningkatkan kualitas PAUD.
2. Keterlibatan Stakeholder: Keterlibatan orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, serta organisasi non-pemerintah dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan. Kolaborasi yang baik antara semua pihak akan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih kondusif.
3. Peningkatan Kapasitas Guru PAUD: Pelatihan dan sertifikasi untuk guru PAUD dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka dalam melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak. Guru yang terlatih akan lebih mampu memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

4. Fasilitas dan Infrastruktur yang Memadai: Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti ruang kelas yang nyaman, alat peraga pendidikan yang berkualitas, dan akses teknologi, akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan PAUD.
5. Kesadaran tentang Pentingnya PAUD: Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya pendidikan di usia dini dapat mempercepat implementasi kebijakan ini. Ketika masyarakat memahami manfaat PAUD, mereka akan lebih mendukung kebijakan dan program yang ada.

### Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan Anggaran: Salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan adalah keterbatasan anggaran. Tanpa dana yang cukup, berbagai program peningkatan kualitas PAUD, seperti pelatihan guru, pengadaan fasilitas, dan program pengawasan kualitas, akan sulit terlaksana dengan maksimal.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kualitas PAUD sangat bergantung pada kompetensi dan jumlah guru yang tersedia. Jika jumlah guru PAUD kurang atau belum memiliki kualifikasi yang memadai, hal ini dapat menghambat pencapaian kualitas pendidikan yang diinginkan.
3. Infrastruktur yang Tidak Memadai: Banyak fasilitas PAUD yang masih belum memadai atau tidak merata, terutama di daerah terpencil. Kekurangan fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas yang tidak memadai, peralatan pendidikan yang kurang, dan akses teknologi yang terbatas, menjadi kendala besar.
4. Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi: Tanpa adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang baik, sulit untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dengan efektif. Program evaluasi yang tidak berjalan dengan baik dapat mengurangi dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan.
5. Ketidaksesuaian Kurikulum dengan Kebutuhan Lokal: Terkadang, kurikulum yang diterapkan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Kurikulum yang seragam tidak selalu cocok dengan kondisi lokal yang beragam, sehingga pengajar dan lembaga PAUD perlu

menyesuaikan pengajaran mereka dengan kondisi masyarakat setempat.

6. Kurangnya Sosialisasi: Jika kebijakan dan program peningkatan kualitas PAUD tidak disosialisasikan dengan baik, baik kepada guru, orang tua, maupun masyarakat, maka implementasinya akan kurang maksimal. Pemahaman yang terbatas tentang kebijakan ini dapat menyebabkan kurangnya dukungan dari berbagai pihak.
7. Kesenjangan Antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan: Terkadang, kebijakan dan program yang ada lebih menguntungkan daerah perkotaan, sedangkan daerah pedesaan atau terpencil menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal akses, kualitas pengajaran, dan fasilitas pendidikan.

Temuan penelitian tersebut dapat ditunjukkan dari hasil analisis regresi linear sederhana antara Implementasi Kebijakan (X) terhadap Kualitas Pelayanan PAUD (Y) dapat dilihat pada Lampiran 3.4, dimana diketahui bahwa nilai koefisien regresi b yang diperoleh adalah 1,036 menunjukkan nilai yang positif, dan nilai a (constant) adalah 15,164. Dengan demikian pola hubungan antara kedua variabel ini dinyatakan oleh persamaan regresi  $\hat{Y} = 15,164 + 1,036 X$ . Berdasarkan teori menunjukkan model persamaan ini memberikan informasi, bahwa setiap perubahan satu unit skor Implementasi Kebijakan (X) akan dapat menjelaskan terjadinya perubahan skor Kualitas Pelayanan PAUD (Y) sebesar 1,036 pada konstanta 15,164. Kemudian berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan t-hitung > t-tabel (15,164 > 2,023) atau nilai Sig < taraf signifikan  $\alpha = 0,05$  (0,000 < 0,05). Jadi dari hasil analisis tersebut dilihat dari koefisien regresi linear sederhana dan hasil uji t menunjukkan bahwa: Terdapat pengaruh implementasi kebijakan yang positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan PAUD di Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

Sedangkan besarnya pengaruh atau kontribusi variabel Implementasi Kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan PAUD ditunjukkan oleh nilai R square (R<sup>2</sup>) pada tabel Model Summary, nilai tersebut adalah sebesar 0,571 yang dapat dilihat pada Lampiran 3.4. Secara statistik ini memberikan pengertian bahwa 57,1% Kualitas Pelayanan PAUD dipengaruhi oleh Implementasi

Kebijakan, dan 42,9% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak turut untuk diteliti.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Besarnya pengaruh Kualitas Pelayanan Terdapat pengaruh implementasi kebijakan yang positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan PAUD di Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, yang ditunjukkan oleh t-hitung > t-tabel (7,199 > 2,023) atau nilai Sig < taraf signifikan  $\alpha$  (0,000 < 0,05). Kemudian besarnya besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan adalah sebesar 57,1%, dan 42,9% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak turut untuk diteliti.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dari kedua variabel penelitian, yaitu baik implementasi kebijakan maupun kualitas pelayanan PAUD termasuk kategori "Baik". Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan faktor penting yang dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan PAUD di Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

Disarankan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, agar dapat melakukan sosialisasi yang jelas dalam melakukan implementasi kebijakan. Perihal ini diperoleh berdasarkan penilaian responden, bahwa kedua indikator tersebut memiliki nilai terendah dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya dalam implementasi kebijakan PAUD. Disamping itu juga, agar dapat meningkatkan keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan. Kedua indikator tersebut memiliki nilai terendah dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya dalam kualitas pelayanan PAUD di Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Usman Rianse, 2019. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Bandung: Alfabeta.
- Anselm Strauss, Juliet Corbin, 2019. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi, 2018. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta.

- A. Sihotang, 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Bungin, Burhan, 2019. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Depok: Prenadamedia Group.
- Ghozali, Imam, 2018. Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya, Semarang: Yogi Pratama.
- , 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Handayani, Ririn, 2020. Metodologi Penelitian Sosial. Yogyakarta: Trussmedia. Grafika.
- Hartatik, Indah Puji, 2019. Buku Praktis Mengembangkan SDM, Yogyakarta: Laksana
- Ibrahim, Amin, 2017. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya, Bandung: Mandar Maju.
- Larasati, S, 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama, Yogyakarta: CV.Budi Utama.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, 2020. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moehariono, 2018. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2020. Metodologi Penelitian Kesehatan, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Purwanto, M. N., 2021. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Ravianto, J., 2018. Manajemen Personalialia, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rivai, V., & Sagala, E. J., 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Teori ke Praktik, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sedarmayanti, 2019. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P., 2020. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
- Simamora, Henry, 2020. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: STIE YKPN
- Sinambela, L. P., 2021. Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja Yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarmanto, 2019. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudjana, 2018. Metode Statistika, Bandung: Tarsito.
- Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta.
- , 2020. Statistika Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta.
- , 2020. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar, 2018. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan, Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Sukmalana, Soelaiman, 2018. Metode dan Tehnik Penulisan Karya Ilmiah (Tesis dan Disertasi), Jakarta: Universitas Suryadharma.